

LITERASI MEDIA SEBAGAI MANAJEMEN KONFLIK KEAGAMAAN DI INDONESIA

Anisa Setya Arifina

Universitas Tidar

Jalan Kapten Suparman 39, Potrobangsari, Magelang

E-mail : anisaarifina@gmail.com

Abstract: *Judging from the social situation in Indonesia, horizontal conflict with religious sentiment was escalated since Pilkada that was held simultaneously on February 15, 2017. The issue of alleged blasphemy of Islam by Ahok rolling the snowball effect of politics that could threaten national security. The use of social media is escorted by the government through the Electronic Information and Transaction Act (UU ITE). Religious conflict management is also supported by all stakeholders including netizens who are expected to be able to use social media wisely and responsible for what they are disseminating and not easily provoked by information spread across social media.*

Keywords: *media literacy, social media, politics, conflict management*

Abstrak: *Dilihat dari situasi sosial yang ada di Indonesia, konflik horizontal dengan sentimen agama mengalami eskalasi semenjak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang berlangsung pada tanggal 15 Februari 2017. Permasalahan kasus dugaan penistaan Islam oleh Ahok menggulirkan efek bola salju politik yang bisa mengancam keamanan nasional. Penggunaan media sosial dikawal oleh pemerintah melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Manajemen konflik keagamaan juga sebaiknya didukung oleh semua stakeholder termasuk netizen yang diharapkan mampu menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab atas apa yang disebarkannya serta tidak mudah terpancing informasi yang beredar di media sosial.*

Kata kunci: *literasi media, media sosial, politik, manajemen konflik*

Pendahuluan

Menurut Kornblurn (dalam Risman, 2015: 393), konflik menjadi fenomena yang paling sering muncul karena konflik selalu menjadi bagian manusia yang bersosial dan berpolitik serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial politik. Konflik menjadi bagian yang tidak bisa dihindari dari proses interaksi sosial terutama dalam masyarakat plural seperti di Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan sebuah strategi untuk mengelola atau meredam konflik yang timbul. Dari pernyataan tersebut, poin yang menjadi titik berangkat tulisan ini adalah strategi yang tepat dalam pengelolaan konflik di dalam masyarakat plural.

Dalam melakukan pencegahan konflik, maka langkah pertama yang harus segera diambil adalah melakukan penilaian objektif terhadap penyebab konflik. Terdapat dua jenis konflik yaitu konflik horizontal dan vertikal. Konflik horizontal mengacu pada konflik yang terjadi antara dua atau lebih kelompok budaya atau agama yang berbeda. Sedangkan konflik vertikal mengacu pada konflik yang terjadi antara pemerintah dan kelompok budaya atau agama tertentu (Sukma, 2005: 3). Dilihat dari situasi sosial yang ada di Indonesia, konflik horizontal mengalami eskalasi semenjak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang berlangsung pada tanggal 15 Februari 2017.

Pasalnya, Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta menjadi fenomena politik yang memicu konflik horizontal di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh tiga hal. **Pertama**, kuantitas pemberitaan Pilgub DKI Jakarta yang mendominasi pemberitaan di media massa. Padahal terdapat tujuh provinsi yang melaksanakan Pilgub, 18 kota yang melaksanakan Pemilihan Walikota (Pilwalkot) dan 76 Kabupaten yang melaksanakan Pemilihan Bupati (Pilbup). Intensitas pemberitaan tentang Pilgub DKI Jakarta yang mendominasi media massa mulai terlihat sekitar bulan Oktober 2016. Komunikasi Indonesia Indicator mencatat bahwa selama November 2016, pemberitaan Pilkada sebanyak 52.773 dari 818 media berita *online*. Namun pemberitaan Pilkada DKI Jakarta mencapai 58% dan 43% merupakan pemberitaan di 100 wilayah lainnya (Fahrudin, nasional.kompas.com, 2 Desember 2016).

Menurut riset yang dilakukan oleh Isentia (Prihadi, cnnindonesia.com, 27 Maret 2017) terhadap media massa tradisional maupun media sosial, terdapat 259.382 perbincangan di media sosial dan 7.165 artikel di media massa tradisional mengenai Pilgub DKI Jakarta. Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lebih sering diperbincangkan di media *online* dan media massa tradisional daripada pasangan calon Anies Baswedan. Cara berkampanye,

program kerja yang disampaikan kepada masyarakat, debat politik yang dilakukan kandidat di televisi dan dukungan yang mengalir dari kelompok pendukung masing-masing kandidat menjadi

perbincangan seru di kalangan *netizen*. Terbukti dengan banyaknya *meme* yang beredar di dunia maya pada masa Pilkada tahun 2017.

Gambar 1.1 Contoh *meme* yang beredar di dunia maya mengenai Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017



Kedua, kualitas isi pemberitaan mengenai Pilgub DKI Jakarta yang tidak menerapkan prinsip jurnalisme damai dan rendahnya literasi media yang dimiliki oleh masyarakat dalam menggunakan media sosial untuk menyampaikan pendapatnya. Santosa (2017: 205) menjelaskan bahwa isi pemberitaan Pilkada ini menjadi makin “panas” karena salah satu calon gubernur yaitu Ahok dilaporkan oleh Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) terkait pernyataan Ahok

yang dianggap melecehkan agama Islam. Masyarakat khususnya umat Islam ikut serta menyuarakan pendapatnya baik melalui media sosial serta aksi damai turun ke jalan menuntut Ahok untuk diproses secara hukum. Di sisi lain, massa pro Ahok pun juga melakukan “perlawanan” dengan melakukan aksi serupa dengan tema yang berbeda Menurut penelitian Putra (dalam Judhita, 2017: 70) yang berjudul “Ahok dalam Berita Maya”, situs berita *online*

VOA-Islam menyajikan berita yang tidak berimbang bahkan sebagian besar bertendensi negatif dan memojokkan Ahok dengan tingginya persentasi jumlah berita yang bermuatan isu Suku, Agama, Ras, Antar golongan (SARA).

Euforia Pilgub DKI Jakarta tidak hanya terjadi dalam pemberitaan media massa saja, namun euforia tersebut juga bermunculan di media sosial. Euforia Pilkada tahun 2017 dapat dilihat dari berbagai pendapat atau persepsi masyarakat di media sosial mengenai ketiga calon gubernur dan wakil gubernur yang maju pada Pilgub DKI Jakarta. Perang di media sosial mulai muncul dengan banyaknya serangan ke calon tertentu. Ahok banyak diserang soal kebijakan penggusuran dan ucapannya yang menyinggung umat Islam. Anies Baswedan juga dikritik karena mendapat dukungan dari Prabowo Subianto, sedangkan Agus Harimurti Yudhoyono dicecar oleh *netizen* sebagai anak “ingusan”. Bahkan menurut Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), riuhnya percakapan di media sosial dapat membuat suasana Pilgub DKI Jakarta menjadi tidak kondusif (Arkhelas, tempo.co, 5 Oktober 2016). Saling serang antar kelompok pendukung tidak dapat dihindari karena mereka merasa calon gubernur yang didukungnya adalah calon pemimpin yang paling baik untuk memimpin Jakarta.

Hal ini sesuai dengan perubahan bentuk komunikasi dari *mass communication* menjadi *mass self mobile communication*. Dimana sebelum era *mass self-mobile communication*, masyarakat menjadi pihak yang pasif dalam menerima pesan politik yang dibuat oleh elite politik. *Mass self mobile communication* mampu membuat masyarakat menyatakan pandangan, pernyataan dan sikap politik mereka secara bebas melalui media sosial (Arifina, 2015: 3). Tentu saja kebebasan ini akan menimbulkan efek negatif jika masyarakatnya belum memiliki kemampuan literasi media yang baik.

Ketiga, proses pemilihan umum yang kemudian dibungkus dengan isu agama semakin memperpanjang konflik horizontal yang terjadi pada Pilgub DKI Jakarta. Tidak jarang untuk menarik simpati masyarakat, beberapa kelompok pendukung menjadikan isu agama untuk menyerang kelompok lainnya. Misalnya saja, video kampanye Ahok dan Djarot Saiful Hidayat yang dilaporkan kepada Banwaslu karena menyudutkan umat Islam. Video tersebut dianggap menyudutkan umat Islam karena menimbulkan kesan bahwa umat Islam adalah pembuat keonaran (Rizky, news.okezone.com, 10 April 2017).

Kelompok pendukung lainnya melakukan kritik keras terhadap Anies Baswedan karena dia melakukan kerjasama politik dengan kelompok Islam garis keras

yang menggunakan retorika rasis terhadap etnis Tionghoa dan seruan agar Ahok dipenjara karena menghujat Islam (Kwok, time.com, 20 April 2017). Isu-isu SARA mulai dikembangkan untuk menjatuhkan kandidat yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Berbagai aksi protes dari masyarakat dilakukan di berbagai daerah. Ribuan umat Islam menggelar aksi untuk menuntut Ahok agar dipenjara karena telah dianggap menghina Islam.

Menurut Thaniago (remotivi.or.id, 30 November 2016), kegaduhan Pilgub DKI Jakarta membuat khalayak media semakin terpolarisasi akibat pilihan politik, keseragaman isi dan kepemilikan media, sistem algoritma media sosial dan mesin pencari yang hanya mendistribusi konten sesuai dengan selera masing-masing individu. Polarisasi ini membuat khalayak mendefinisikan dan menilai kelompok lain yang berbeda dengan mereka secara destruktif. Rutinitas di media massa terutama media sosial adalah panggung yang mempertontonkan sisi destruktif akibat pilihan politik dan media massa yang sarat kepentingan. Aksentuasi dalam keterbelahan khalayak diekspresikan terutama oleh politik keagamaan.

Kehadiran kelompok dan organisasi yang menggunakan simbol-simbol keagamaan dalam politik masih menjadi ciri-ciri transisi demokrasi di Indonesia. Beberapa peristiwa pergolakan politik yang

melibatkan peran serta kelompok-kelompok Islam menjadi persoalan serius tentang arah baru hubungan antara politik dan agama. Pergesekan politik yang bermuatan sentimen memuncak di Pilgub DKI Jakarta (Herdianshah, 2017: 62). Bahkan konflik horizontal bermuatan sentimen agama belum juga mereda, walaupun Pilgub DKI Jakarta telah berakhir. Misalnya pada kasus teror yang dialami oleh dr. Fiera Lovita setelah mengungkapkan pendapat dan sikapnya di *facebook* mengenai tokoh organisasi Islam di Indonesia yang kabur saat akan dimintai keterangan terkait chat mesum. Ada juga video yang viral di media sosial mengenai seorang remaja yang diintimidasi oleh sekelompok orang karena dianggap telah menghina Pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Syihab.

Menurut Herdianshah (2017: 62), permasalahan kasus dugaan penistaan Islam oleh Ahok menggulirkan efek bola salju politik yang bisa mengancam keamanan nasional. Agama menjadi isu yang sangat sensitif untuk diperbincangkan sekarang ini. Penggunaan media sosial dikawal ketat oleh pemerintah melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan agar tidak ada lagi yang memperkeruh konflik horizontal yang sudah terjadi. Hal ini menjadi salah satu cara dalam mengelola dan mencegah terjadinya eskalasi konflik horizontal.

Pengelolaan konflik juga sebaiknya didukung oleh semua *stakeholder* termasuk *netizen* yang diharapkan mampu menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab atas apa yang disembarkannya serta tidak mudah terpancing informasi yang beredar di media sosial.

Pembahasan mengenai manajemen konflik pada umumnya mengambil objek pada organisasi pemerintahan maupun swasta. Sementara kajian manajemen konflik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masih sangat minim. Faktor terpenting dalam menghadapi konflik

Manajemen konflik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Thomas (dalam Samiyono, 2011: 29) menjelaskan bahwa konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun hubungannya dengan orang lain. Konflik merupakan bagian dari proses interaksi yang dinamis. Konflik juga menandakan bahwa kehidupan sosial yang dijalani oleh seseorang mengalami perkembangan dan tidak stagnan. Apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, kita hidup berdampingan dengan individu yang berasal dari agama, suku, ras dan etnis yang berbeda. Maka potensi munculnya konflik juga semakin tinggi.

adalah *good will* dari masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat bisa ikut proaktif dalam menyelesaikan konflik dan krisis yang terjadi (jakartaconsulting.com, 2 Februari 2014). Masyarakat tidak hanya pasrah, bergantung dan menunggu hingga pemerintah mampu menyelesaikan konflik tersebut. Tapi masyarakat juga bisa ikut andil memberikan penyelesaian terhadap konflik yang terjadi. Oleh sebab itu, tulisan ini akan membahas mengenai manajemen konflik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui literasi media.

Hasil dan Pembahasan

Secara kultural, Bhineka Tunggal Ika merupakan fondasi bangsa Indonesia. Budaya, agama dan etnis yang berbeda merupakan hal yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Menurut Samiyono (2011: 27), dari perbedaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, hanya satu yang sulit dipecahkan ketika terjadi konflik, yaitu masalah agama. Salah satu faktor mengapa masalah keagamaan tidak dapat diselesaikan secara tuntas adalah karena isu tentang dianggap sensitif. Sebaiknya tidak usah dibicarakan atau diminalisir pemberitaannya. Akibat jangka panjangnya, ketika konflik agama ini berkembang besar, masyarakat tidak biasa mengelola perbedaan tersebut dengan profesional. Caci maki, segala bentuk intimidasi, dan *cyberbullying* menjadi tindakan-tindakan

yang diambil ketika agama diperbincangkan di ranah publik.

Salah satu untuk mengelola perbedaan agama yang ada di Indonesia adalah dengan menjaga kerukunan inter-umat beragama, antar umat beragama dan umat beragama dengan pemerintah. Sayangnya, ketiga dimensi tersebut sedang menghadapi tantangan besar saat ini. Terjadi perpecahan di dalam kelompok agama yang sama, saling serang di media sosial antara kelompok agama satu dan kelompok agama lain menjadi polemik berkepanjangan semenjak Pilgub DKI Jakarta. Bahkan sekarang pemerintah juga ikut dicibir atas kebijakan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 untuk membubarkan organisasi masyarakat (ormas) yang dianggap radikal dan mengancam kedaulatan negara. Kebijakan tersebut dianggap tidak populer karena pemerintah hanya mencari jalan pintas untuk membubarkan ormas keagamaan tertentu yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Padahal kerukunan dan keharomisan umat beragama di Indonesia bisa dicapai melalui intensifikasi dialog untuk menyelesaikan masalah-masalah hubungan umat beragama. Toleransi beragama hanya bisa berjalan dengan baik apabila ada *mutual trust* diantara komunitas umat beragama (Sumbulah, 2015: 2). *Mutual trust*

antar umat beragama dapat terjadi apabila mereka melakukan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang mampu

Menurut Krauss, (2000: 145-154), terdapat empat paradigma dalam komunikasi yang dapat digunakan untuk resolusi konflik yaitu paradigme *encoding-decoding*, intensionalis, *perspective taking* dan dialogis. Jika dikaitkan dengan kasus konflik keagamaan yang terjadi di Indonesia, maka paradigma yang sesuai adalah intensionalis. Dalam paradigme intensionalis, baik komunikator maupun komunikator harus berusaha memahami apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh si pembuat pesan. Selain itu, dalam pembuatan pesan, seorang komunikator harus mempertimbangkan apa dampak kata-katanya itu kepada orang lain.

Dalam hal ini individu harus bisa memahami pesan yang disampaikan oleh individu yang budaya, agama, dan etnisnya berbeda. Ketika berkomunikasi individu juga harus memahami konteks (*frame of reference* dan *field of experience*) latar belakang budaya, agama, etnis, usia dan pendidikan lawan bicaranya. Kemudian dari sisi pembuatan pesan, seorang individu juga harus secara bijaksana ketika akan menyampaikan informasi. Indonesia sebagai negara plural memiliki bahasa daerah yang beragam. Oleh sebab itu ketika membuat pesan atau menyampaikan

informasi sebaiknya menggunakan bahasa yang tidak menimbulkan makna ganda. Apalagi ketika menyampaikan informasi yang mengandung isu sensitif seperti agama, maka kita harus semakin bijaksana dalam melihat konteks lawan bicara dan pemilihan bahasa.

Literasi media

Devito (dalam Rahardjo, 2012: 6) mengungkapkan bahwa literasi media adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan memproduksi pesan-pesan komunikasi massa (televisi, musik, film, radio, *billboards*, periklanan, *public relations*, surat kabar, majalah, buku, *websites*, *blogs*, *newgroups*, *chatrooms*, media sosial). Individu tidak hanya menjadi individu pasif di tengah gempuran beragam media massa sekarang ini.

Tujuan literasi media yang pertama adalah menjadi kecakapan yang harus dikuasai oleh generasi Y. Dalam era digital seperti sekarang ini, literasi media seharusnya menjadi bahan kajian dalam kurikulum pendidikan (Rahardjo, 2012: 14). Dilihat dari angka pengguna internet per Oktober 2016 adalah 132,7 juta pengguna dan sebanyak 768 ribu penggunanya adalah anak kelompok usia 10-14 tahun. Terpaan internet yang begitu besar untuk usia anak-anak hingga remaja membuat literasi media menjadi kecakapan

yang penting untuk dimiliki oleh generasi Y.

Tujuan literasi media yang kedua adalah untuk meningkatkan kehidupan dan memperbaiki kehidupan individu yang sebagian besar hidupnya diterpa oleh berbagai macam informasi. Art Silverblatt (dalam Rahardjo, 2012: 15 & 17) mengungkapkan bahwa literasi media juga membuat seseorang menjadi lebih bisa berpikir kritis dan mampu mengembangkan penilaian yang independen tentang isi media. Selain itu, individu-individu yang melek media seharusnya juga bisa mengembangkan kecakapan-kecakapan produksi yang memungkinkan mereka menciptakan pesan-pesan yang bermanfaat di *channel* komunikasi.

Telah begitu banyak penelitian di ranah komunikasi yang menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis individu di Indonesia masih lemah dalam menganalisa pesan di sebuah *channel komunikasi*. Misalnya saja banyak disebutkan di berbagai penelitian bahwa perilaku anak-anak menjadi agresif setelah melihat tayangan kartun maupun permainan komputer (*games*). Kecakapan produksi-produksi pesan dalam channel komunikasi juga dinilai masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai tayangan televisi di sIndonesia yang masih didominasi acara-acara yang sifatnya menghibur saja seperti

sinetron, *infotainment*, *live music*, acara komedi, acara mistis dan lain sebagainya.

Literasi media baru

Masyarakat modern di tengah kepekaan digital seperti sekarang ini memunculkan sebuah generasi Y atau disebut juga Net Ger dengan karakteristik sebagai berikut :

- a. Lebih kritis dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk mengubah kondisi sosial lingkungannya.
- b. Menurut Sullivan (2013: 217 & 219) generasi Y ikut mengontrol dan terlibat dalam proses produksi muatan-muatan yang ada di dunia maya. Aplikasi-aplikasi media sosial seperti *twitter*, *youtube*, *Instagram* dan *facebook* tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya masukan (*input*) dari penggunanya. Perusahaan-perusahaan tersebut menyediakan sebuah cara agar konsumennya dapat menciptakan, menyimpan, dan mendistribusikan muatan mediana.

Kendati demikian negara-negara berkembang seperti Indonesia hanya berperan sebagai konsumen pasif kemajuan teknologi tersebut. Hingga muncullah kesenjangan digital yang disebut Febriyanto (2012: 176-178) sebagai akibat dari kepasifan di dalam kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kesenjangan digital ini dapat dilihat dari tiga hal yaitu:

- a. Pemanfaatan internet yang belum maksimal. Dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia, masyarakat Indonesia belum bisa memaksimalkan penggunaan internet. Ambil saja contoh, penggunaan *facebook* dan *twitter* yang hanya digunakan untuk *update* hal-hal yang tidak produktif. Padahal seharusnya sebagai negara terbesar ketiga pengguna *facebook*, masyarakat Indonesia bisa memanfaatkannya secara lebih serius untuk bisnis maupun periklanan. Dengan begitu banyak industri kreatif yang muncul dan berjalan sehingga bisa membantu perekonomian negara (Hidayat, *tekno.kompas.com*, 13 Juli 2012). Data dari New Web Foundation tahun 2016 menyebutkan bahwa 97% perempuan menggunakan media sosial, tapi hanya 48% saja yang menggunakan media sosial untuk memperluas jaringan dan hanya 21% yang menggunakan internet untuk mencari informasi penting seputar kesehatan, bantuan dan transportasi.
- b. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang belum memadai. Belum semua masyarakat Indonesia bisa mengakses internet. Hal ini dikarenakan dua hal yaitu letak geografis Indonesia yang cukup sulit karena terdiri dari pulau-pulau dan kemampuan ekonomi setiap individu yang belum merata. Data dari New Web Foundation tahun 2016

menyebutkan bahwa hanya ada 39% perempuan yang tinggal di lingkungan miskin perkotaan bisa mengakses internet.

c. Kecanduan internet

Sebagai konsumen yang pasif, masyarakat Indonesia hanya bisa melihat muatan atau konten kreatif dan persuasif yang dibuat oleh orang lain. Padahal arus informasi yang beredar di dunia maya berlangsung selama 24 jam sehari. Tidak jarang, akibat fatal seperti kematian menghantui pecandu internet. Pada tahun 2012, seorang *gamer* ditemukan meninggal dunia di depan komputer setelah bermain *game online* selama 13 jam tanpa henti. Kampanye-kampanye untuk mengurangi penggunaan internet terutama media sosial di kalangan anak muda Indonesia juga sering diperdengarkan di radio Prambors.

Oleh sebab itu, literasi media juga perlu untuk diterapkan untuk penggunaan media baru. Apalagi dengan beragam konflik yang muncul akibat penggunaan media sosial yang salah. Setelah Pilgub DKI Jakarta beberapa kali *netizen* ditangkap pihak kepolisian karena dianggap menyebarkan kebencian melalui postingan di media sosialnya.

Peranan literasi media baru dalam manajemen konflik keagamaan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta aplikasi media sosial seperti *facebook*, *Instagram*, dan *Twitter* telah mengalami perkembangan yang luar biasa. Perkembangan ini tentunya diikuti oleh efek yang baik dan buruk untuk masyarakat Indonesia. Dampak baik yang didapat dari era digital adalah :

- a. Kemudahan dalam mendapatkan informasi dimanapun dan kapanpun
- b. Kemudahan berkomunikasi yang melebur batas jarak, ruang, dan waktu.
- c. Mendukung untuk peningkatan bisnis kreatif
- d. Jika dikaitkan dengan konflik keagamaan, maka teknologi informasi dan komunikasi membuat generasi Y mampu untuk berpartisipasi secara aktif dalam komunikasi politik. Generasi muda yang terkenal apatis dalam politik, mulai bisa dan peduli untuk menunjukkan pendapat dan sikap politik mereka dengan cara yang kreatif. Misalnya saja dengan foto kolase Jokowi-JK yang dibuat oleh *netizen* bernama Agan Harahap pada saat pemilu Presiden. Ada juga *vlogger* bernama “Cameo Project” yang memproduksi video parodi mengenai Jokowi dan Prabowo.

Sedangkan dampak buruk yang didapatkan dari internet adalah sebagai berikut:

a. *Cyberbullying*.

Kemampuan tata krama, etika berkomunikasi, rasa empati dan cara penyelesaian konflik yang dimiliki individu menjadi menurun. Karakteristik *computer mediated communication* yang anonim membuat *netizen* bisa bersikap dan berucap apa saja tanpa mendapatkan sanksi sosial langsung dari masyarakat. Orang-orang yang melakukan *cyberbullying* biasanya berlindung dibalik *pseudo-identity* yang dibuatnya. *Netizen* yang kritis di dunia maya, belum tentu bisa bersikap kritis juga di dunia nyata.

b. Unggahan kebencian.

Penyebaran kebencian kepada sekelompok orang atau individu tertentu karena sentimen pribadi atau karena terpengaruh oleh isi media massa. Misalnya menjelekkkan-jelekkkan etnis dan agama tertentu.

c. *Cyber crime*.

Penipuan dan penyebaran ajaran radikalisme agama melalui media sosial. Sasaran dari ajaran radikalisme ini biasanya generasi muda.

Eskalasi konflik keagamaan yang terus merebak menjadikan literasi media baru menjadi sebuah kebutuhan utama untuk bisa bertahan menghadapi terpaan

informasi yang tiada hentinya. Selain itu supaya kita bisa menciptakan informasi atau pesan yang bermanfaat dan mengembalikan stabilitas sosial. Survei yang dilakukan Nielsen (dalam Utomo, indonesia.tempco.co, 11 Agustus 2016) menunjukkan bahwa pengguna Internet di Indonesia didominasi oleh generasi Z (usia 10–19 tahun) dan generasi milenial (20–34 tahun) dengan masing-masing sebesar 34% dan 48%. Artinya, para pengakses Internet kebanyakan adalah pelajar.

Media sosial dan internet sebagai media alternatif dalam menyampaikan pendapat sepertinya tidak lagi berfungsi. Monopoli kepemilikan media massa tradisional menjadi alasan mengapa media sosial menjadi media alternatif. Namun lama-kelamaan media sosial tidak lagi menjadi media yang bebas dari monopoli. Kali ini media sosial dimonopoli oleh kelompok mayoritas di Indonesia (kelompok keagamaan dan pemerintah).

Literasi media baru untuk menyelesaikan konflik keagamaan tidak hanya berusaha mengajari masyarakat bagaimana untuk bersikap kritis dan bermanfaat dalam memproduksi pesan di media sosial, tapi juga mengingatkan kembali bahwa media sosial merupakan media komunikasi yang mampu mengembalikan stabilitas sosial, jika fungsinya sebagai media alternatif kembali.

Simpulan

Konflik keagamaan terjadi karena masyarakat Indonesia tidak terbiasa membicarakan isu-isu sensitif seperti perbedaan agama di ruang publik. Ketika pembicaraan ini muncul dan mengakibatkan konflik, masyarakat Indonesia tidak bisa menyelesaikannya secara profesional (interaksi dan berkomunikasi dengan baik) guna mencari penyelesaian. Alih-alih kelompok-kelompok masyarakat yang berseteru menggunakan media sosial untuk menyerang satu sama lain. *Cyberbullying* dan unggahan kebencian menjadi cara yang ditempuh untuk mengomunikasikan isu perbedaan agama yang muncul.

Disinilah literasi media perlu dimasukkan kedalam kurikulum pendidikan sejak dini. Hal ini untuk mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi konflik-konflik yang mungkin muncul. Generasi muda perlu diingatkan bahwa mereka juga memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas sosial dengan cara bersikap kritis terhadap segala sesuatu yang disampaikan oleh media massa dan bersikap bijak serta bertanggung jawab sebagai seorang *netizen*.

Daftar Pustaka

- Sullivan, John L. (2013). *Media Audiences Effects, Users, Institutions, and Power*. USA: Sage
- Herdiansah, Ari Ganjar dan Junaidi dan Heni Ismiati. (2017). *Pembelahan Ideologi, Kontestasi Pemilu dan Persepsi Ancaman Keamanan Nasional Spektrum Politik Indonesia Pasca 2014?*. *Jurnal Wacana Politik* 2(01): 61-73
- Juditha, Christian. (2017). Sentimen dan Imparsialitas Isi Berita Tentang Ahok di Portal Berita Online. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan* 18(01): 57-73.
- Risman, Hendrik. (2015). Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas Antar Kampung Di Daerah Kabupaten Kutai Barat (Konflik Kampung Muhur dan Kampung Kaliq). *eJournal Pemerintahan Integratif* 3(3): 392-406
- Santosa, Bend Abidin. (2017). Peran Media Massa Dalam Mencegah Konflik. *Jurnal ASPIKOM* 3(2): 199-214.
- Sumbulah, Umi. (2015). Pluralisme dan Kerukunan Umat Beragama Perspektif Elite Agama Di Kota Malang. *Analisa Journal of Social Science and Religion* 22(1): 1-13.
- Fardiah, Dedeh dkk. (2015). Literasi Internet Dalam Meminimalisasi Dampak Negatif Media Jejaring Sosial. *Prosiding*. Bandung: Universitas Islam Bandung.
- Samiyono, David. (2011). Pluralisme dan Pengelolaan Konflik. *Prosiding*.

- Lokakarya Membangun Perdamaian di Dalam Masyarakat Berbhineka Tunggal Ika. Salatiga: UKSW.
- Arifina, Anisa Setya. (2015). Konstruksi Citra Pemimpin Politik Dalam Seni Foto Kolase Di Instagram. *Tesis*. Universitas Indonesia.
- Febriyanto, Tomi. (2012). Literasi Media dan Kearifan Lokal Konsep & Aplikasi. *Kesenjangan Digital dan Literasi Media Baru* (166-181). Mata Padi Presindo.
- Krauss, Robert & Ezequiel Morsella. (2006). The Handbook of Conflict Resolution. *Communication and Conflict* (144-157). San Fransisco: Jossey Bass.
- Rahardjo, Turnomo. (2012). Literasi Media dan Kearifan Lokal Konsep & Aplikasi. *Memahami Literasi Media* (Perspekti Teoritis) (1-24). Mata Padi Presindo.
- Sukma, Rizal. (2005). Ethnic Conflicts in Southeast Asia. *Ethic Conflict In Indonesia Causes and the Quest for Solution* (1-41). Singapura: ISEAS Publication.
- Fachrudin, Fachri. (2016). Ini Alasan Pemberitaan Pilkada DKI Jakarta Mendominasi. Diakses di <http://nasional.kompas.com/read/2016/12/02/23151391/ini.alasan.pemberitaan.pilkada.dki.jakarta.mendominasi> pada tanggal 24 Agustus 2017.
- Prihadi, Susetyo Dwi. (2017). Ahok Paling Sering Dibicarakan di Media Sosial. Diakses dalam <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170327103942-185-202952/ahok-paling-sering-dibicarakan-di-media-sosial/> pada tanggal 24 Agustus 2017.
- Thaniago, Roy. (2016). Krisis Media Pesta Elit: Pilkada dalam Berita. Diakses dalam <http://www.remotivi.or.id/amatan/337/Krisis-Media,-Pesta-Elit:-Pilkada-dalam-Berita> pada tanggal 13 Februari 2017 pukul 15.30
- Arkhelous W dan Rezki Alvionitasari dan Linda Hairani. (2016). Pemilihan Gubernur Jakarta di Media Sosial Marak. Diakses di <https://www.tempo.co/read/fokus/2016/10/05/3369/pemilihan-gubernur-jakarta-perang-di-media-sosial-marak> pada tanggal 24 Agustus 2017.
- Fahreza, Rifky. (2017). Video kampanye Milik Ahok Djarot Lukai Umat Islam. Diakses di <https://news.okezone.com/read/2017/04/10/338/1663503/video-kampanye-milik-ahok-djarot-dinilai-melukai-umat-islam> pada tanggal 24 Agustus 2017.
- Kwok, Yenni. (2017). Conservative Islam Has Scored a Disquieting Victory in Indonesia's Normally Secular Politics. Diakses di

<http://time.com/4747709/indonesia-jakarta-election-governor-islam-christianity-ahok-anies/> pada tanggal 24 Agustus 2017.

Ipsos-Mori. (2015). Women's Rights Online: Translating Access into Empowerment. Diakses di <https://webfoundation.org/research/womens-rights-online-2015/> pada tanggal 24 Agustus 2017.

Hidayat, Wicaksosno Surya. (2012). Di Indonesia, Pemanfaatan Media Sosial Belum Maksimal. Diakses di <http://tekno.kompas.com/read/2012/07/13/14003694/di.indonesia.pemanfaatan.media.sosial.belum.maksimal> pada tanggal 24 Agustus 2017.

Sugiharto Bintoro Agung. (2016). Pengguna Internet di Indoneisa Didominasi Anak Muda. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161024161722-185-167570/pengguna-internet-di-indonesia-didominasi-anak-muda/> pada tanggal 24 Agustus 2017.

Utomo, Wisnu Prasetyo. (2016). Konflik Sosial dan Literasi Media. Diakses di <https://indonesiana.tempo.co/read/84952/2016/08/11/inusetya.1/konflik-sosial-dan-literasi-media-wisnu-prasetyo-utomo> pada tanggal 24 Agustus 2017.